

HASIL IDENTIFIKASI MASALAH DAN REKOMENDASI PEMECAHAN MASALAH

	Apa	Bagaimana	Siapa	
			Pusat	Daerah
1.	Belum siapnya lembaga masyarakat untuk mengelola berbagai skema HD dan HTR	Fasilitasi penyiapan lembaga masyarakat (kelompok dan desa)		Dishutbun Prov Dishutbun kab LSM :
2.	Perlu pengembangan kelompok HKm berkaitan dengan koperasi	Fasilitasi proses penguatan kelompok HKm menuju koperasi untuk IUPHHK HKm	RLPS	BPDAS Dishutbun Prov Dishutbun kab LSM
3.	Areal yang berpotensi untuk calon lokasi HTR dan HD belum clear dan clean.	1. Perlu identifikasi ulang mengenai kondisi existing calon lokasi dan land tenure 2. Perlu tata batas pada areal potensi calon HD dan HTR	Baplan WGT	BPKH Dishutbun Prov/ kab
4.	Belum adanya mekanisme jelas antara domain terkait dengan UPT di lapangan berkaitan dengan penetapan kawasan karena belum standar yang baku lintas Ditjen untuk mempercepat proses verifikasi yang diajukan.	Perlu koordinasi lintas ditjen dan standar baku untuk mempercepat proses verifikasi untuk penetapan areal, sehingga memperlambat perijinan ◊ perlu tata hubungan kerja antar pusat dan daerah untuk mempercepat proses perijinan	Setjen RLPS Baplan BPK WGP	BPDAS BPKH Dishutbun Prov / kab
5.	Prosedur perijinan yang lambat dan panjang	Perlu adanya DESK perijinan PHLBM di Dephut untuk mempercepat proses perijinan. Bersifat formal, perlu juga sampai pada level daerah	Setjen RLPS BPK WGP	Dishutbun prov/kab Pokja
6.	Adanya proses pembentukan KPH	Mensinkronkan perencanaan CBFM dengan pembentukan KPH dalam satu perencanaan	Baplan	Dishut Prov / kab BPKH PT

	Apa	Bagaimana	Siapa	
			Pusat	Daerah
7.	Belum adanya peta digitasi yang standar dalam pengusulan skema PHLBM	Fasilitasi peta digitasi untuk pengusulan areal kerja untuk PHLBM	Baplan	BPKH Dishut prov/kab
8.	P.37 belum mengatur ttg pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung → kasus lampung dan DIY	Review Permenhut 37 berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung → addendum.	RLPS Biro Hukum Dephut Puslit Sosekjak	Pokja
9.	Belum adanya Sosialisasi tata cara penyelenggaraan HKm berkaitan dengan RU dan RO HKm	Fasilitasi sosialisasi tata cara penyelenggaraan HKm berkaitan dengan RU dan RO HKm sehingga sinkron dengan yang dilakukan di daerah	RLPS WGP	BPDAS Dishutbun prov/kab Pokja Hkm
10.	Kondisi aktual kawasan untuk pengembangan HKm, HD ataupun HTR di DIY	Review pengembangan CBFM di DIY pada areal 3.000 ha sisa pencadangan HKm		Dishutbun Prov Dishutbun Kab BPDAS BPKH LSM